

## **BAB II**

### **SEJARAH KONFLIK ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR**

Dalam bab II ini akan dibahas mengenai sejarah awal terbentuknya etnis Rohingya di wilayah Rakhine, yang dulunya dikenal dengan nama Arakan. Akan dijelaskan bagaimana dimulainya perkembangan peradaban etnis Rohingya yang beragama Islam. Selanjutnya akan dibahas beragam bentuk diskriminasi yang diterima etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar, serta bagaimana awal terjadinya konflik komunal antara etnis Rohingya dan kaum Buddhis Rakhine di tahun 2012.

#### **A. Sejarah Etnis Rohingya di Rakhine**

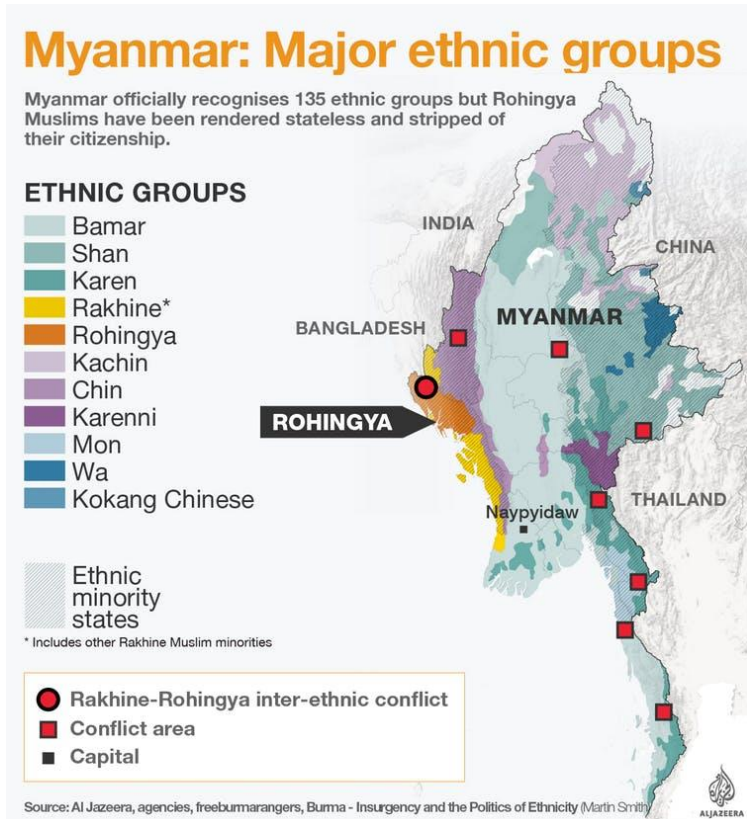
Myanmar merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan luas 676,578 km<sup>2</sup>, berbatasan dengan India, Bangladesh, China, Laos, Thailand, Teluk Benggala dan Laut Andaman. Berdasarkan sensus tahun 2014, Myanmar didominasi dengan penganut agama Buddha yang berjumlah sekitar 87.9%, disusul dengan agama Kristen sekitar 6.2%, dan agama Islam sekitar 4.3%. Negara ini dikenal dengan negara yang multikultural. Sekitar 60% dari total populasi merupakan non-Burma, di antaranya ialah ras Shan, Chin, Kachin, Karen, Kayah, Mon, Pa-o, Palaung, Padaung, Dragon. Lahu, Akha, Wa, Rohingya (Arakan beragama Muslim), Rakhine (Arakan beragama Buddha) dan banyak ras pribumi lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Tha, T. B. (2007). *A Short History of Rohingya and Kamans of Burma*. Hal. 3.

Rakhine yang dulu disebut dengan Arakan merupakan salah satu negara bagian dari Republik Persatuan Myanmar. Letaknya berada di sebelah barat Myanmar, berhadapan langsung dengan Teluk Benggala. Rakhine dihuni oleh dua etnis utama, yaitu etnis Rohingya dan etnis Rakhine (Magh). Etnis Rohingya dikenal dengan etnis yang beragama Islam, dan secara fisik dan bahasa mirip dengan orang-orang Bengali dari Bangladesh. Sedangkan etnis Rakhine dikenal dengan etnis yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Penduduk Etnis Rohingya umumnya terkonsentrasi di bagian utara Rakhine State.

Gambar 2. 1 Peta Persebaran Etnis-etnis di Myanmar



Sumber: aljazeera.com (diakses pada 2 April 2018)

Arakan yang terletak di pesisir pantai dahulunya merupakan wilayah yang terkenal bagi para pedagang. Selama masa Khilafah Harun al-Rashid (786-809), pedagang baik dari Arab maupun Turki biasa lalu-lalang di sini. Para pedagang Arab telah datang ke Burma sejak abad ke-9 dan beberapa sejarawan menegaskan bahwa mereka datang sejak abad ke-8.<sup>14</sup> Pada era ini pedagang-pedagan Arab sangat aktif di wilayah perairan Asia Tenggara. Pengetahuan mendalam mereka dalam navigasi, ilmu lintang dan bujur, fenomena astronomi dan geografi negara-negara yang mereka telah kunjungi membuat mereka tak tertandingi dalam kegiatan perdagangan di Samudra Hindia selama berabad-abad.<sup>15</sup>

Dinasti Chandra yang menguasai wilayah Arakan juga menyambut baik kedatangan para pedagang Arab tersebut. Selain berdagang, para pedagang arab ini juga mulai menyebarkan agama Islam. Agama Islam mulai menyebar di Arakan melalui pedagang Arab yang menikahi wanita lokal dan kemudian menetap di Arakan. Sebagai hasil dari perkawinan ini, populasi Muslim di Arakan mulai tumbuh.<sup>16</sup> Para pedagang yang menetap ini juga mulai meninggalkan pekerjaan mereka sebagai pelaut dan beralih ke bidang pertanian.

---

<sup>14</sup> Mazhar, M. S., & Goraya, N. (2016). *Plight Of Rohingya Muslims*, Hal. 29.

<sup>15</sup> Alam, M. A. (1999). *A Short Historical Background of Arakan*, Hal. 7.

<sup>16</sup> Tan, A. T. (2009 ). State terrorism in Arakan. Dalam *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia* (hal. 327). Massachusetts: Edward Edgar Publishing. Inc.

Sedangkan untuk istilah ‘Rohingya’ sendiri masih menjadi perdebatan. Sejarahwan Rohingya Khalilur Rahman menyatakan bahwa istilah Rohingya berasal dari bahasa Arab ‘Raham’ yang berarti rahmat atau belas kasihan. Ia berspekulasi bahwa Muslim yang tiba awal di Arakan merupakan pedagang Arab yang kapalnya terdampar dan terancam hukuman mati oleh Raja Arakan. Mereka lalu meminta ampun seraya meneriakkan kata ‘Rahma’. Oleh karena itu mereka dipanggil dengan sebutan ‘Raham’. Secara bertahap, istilah Raham berganti menjadi Rhohang dan akhirnya menjadi Rohingya.<sup>17</sup> Sementara itu mantan Presiden dan Sekretaris Konferensi Muslim Arakan, Jahiruddin Ahmed dan Nazir Ahmed memiliki argumen berbeda. Mereka berargumen bahwa kapal yang terdampar ialah milik Muslim Thambu Kya yang tinggal di pesisir pantai Arakan. Kaum muslim inilah yang merupakan etnis Rohingya sebenarnya, dan mereka adalah keturunan penduduk Ruha di Afghanistan.<sup>18</sup>

Selain memiliki garis keturunan dari bangsa Arab, etnis Rohingya juga memiliki garis keturunan dari bangsa Moor, Pathan, Moghul, Asia Tengah, Bengal, dan beberapa bangsa Indo-Mongoloid. Karena memiliki campuran dari banyak jenis suku, penampilan fisik mereka berbeda dengan etnis Rakhine dan Burma, seperti tulang pipi mereka yang tidak menonjol dan mata yang tidak terlalu sempit. Hidung etnis Rohingya tidak pesek, kulit yang lebih gelap dan mereka sedikit lebih tinggi daripada etnis Rakhine Magh. Rohingya di Arakan juga masih membawa tradisi Arab seperti penggunaan nama, kepercayaan, pakaian, musik dan adat istiadat. Hal ini menunjukkan bahwa etnis Rohingya merupakan etnis yang telah lama mendiami wilayah Rakhine. Mereka bukanlah etnis

---

<sup>17</sup> Leider, J. (2012). On the term “Rohingya”. *Rohingya - A historical and Linguistic Note*, (hal. 1).

<sup>18</sup> *Ibid* (Hal. 2)

yang baru muncul, melainkan etnis pribumi di negara tersebut.<sup>19</sup>

Abad ke-14, kebudayaan Islam terus berkembang di wilayah Arakan, terutama saat Arakan dikuasai oleh kerajaan Mrauk-U. Pada tahun 1429 wilayah Arakan berhasil direbut dari bangsa Burma oleh Raja Naramekhla dengan bantuan Kerajaan Bengal. Meskipun Raja Naramekhla dan ahli warisnya menganut agama Buddha, ia tetap mempertahankan kebudayaan Islam di Arakan. Atas pengakuan kerajaannya, raja-raja kerajaan Mrauk-U menerima gelar-gelar Islam, serta melegalkan penggunaan koin emas dinar dari kerajaan Bengal. Selain itu, banyak umat muslim juga mengisi jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan kerajaan.<sup>20</sup> Dalam periode tahun 1430 hingga 1784 Arakan yang dihuni etnis Rohingya menjadi wilayah Islam yang kuat.

Sampai pada abad ke-18, Kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Hingga pada tahun 1784, 30.000 pasukan dari raja Burma Bodawpaya berhasil menaklukkan Arakan. Jatuhnya kerajaan Mrauk-U mengawali penderitaan etnis Rohingya di Arakan. Kerajaan Burma yang menganut agama Buddha tersebut menghancurkan masjid, kuil, seminari, perpustakaan, dan berbagai peninggalan kerajaan sebelumnya.<sup>21</sup> Perlakuan diskriminatif juga dilakukan Raja Bodawpaya terhadap muslim Rohingya. Dimulai dengan menghilangkan berbagai infrastruktur keislaman antara lain menghancurkan masjid dan mengalihkan fungsinya menjadi

---

<sup>19</sup> (Alam, 1999) Op.cit., (hal. 9)

<sup>20</sup> Yegar, M. (2002). Muslim Settlement in Arakan. Dalam *Between Integration and Secession* (hal. 24). Oxford: Lexington Books.

<sup>21</sup> (Alam, 1999) Op.cit., (hal. 22).

pagoda atau mengubah madrasah menjadi Kyang (lembaga keagamaan kaum Buddha).<sup>22</sup>

Kondisi etnis Rohingya semakin terpuruk ketika Burma secara *de jure* memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Proses kemerdekaan dimulai saat Jendral Aung San dan perwakilan dari berbagai etnis di Burma sepakat menandatangani perjanjian penyatuan Burma tanggal 12 September 1947.<sup>23</sup> Perjanjian ini menyepakati untuk merebut kemerdekaan dari koloni Inggris dan membentuk Burma menjadi negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian.

Pada saat kemerdekaan Myanmar tiba, tidak ada perwakilan dari etnis Rohingya yang diundang. Berbeda dengan etnis lain yang berhak mendirikan negara bagian sendiri, etnis Rohingya kehilangan hak dan wilayah Arakan diserahkan kepada etnis Rakhine yang memiliki populasi kurang dari 10% di wilayah tersebut.<sup>24</sup> Pada saat inilah diskriminasi pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dimulai.

## **B. Diskriminasi Myanmar Terhadap Etnis Rohingya**

Pada awal kemerdekaan Burma tepatnya pada era kepemimpinan Perdana Menteri U Nu, etnis Rohingya saat itu diakui sebagai warga negara yang sah. Deklarasi pemerintahan parlementer Burma era kepemimpinan Perdana Menteri U Nu dijelaskan:

---

<sup>22</sup> Hartimah, T. (2010). *Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar*, (hal. 88).

<sup>23</sup> *Ibid.* (Hal. 89)

<sup>24</sup> *Ibid.*

*“The people living in Maungdaw and Buthidaung regions are our national brethren. They are called Rohingya. They are on the same par in the status of nationality with Kachin, Kayah, Karen, Mon, Rakhine and Shan. They are one of the ethnic races of Burma.”*<sup>25</sup>

Deklarasi ini dengan jelas menyebut etnis Rohingya dan mengakui etnis ini sebagai salah satu suku asli etnis Burma.

Selain itu, terjadi juga penolakan dari anggota parlemen Burma yang ingin memisahkan kawasan permukiman etnis Rohingya dari negara bagian Arakan. Perdana Menteri U Nu akhirnya memutuskan untuk membentuk wilayah administrasi bernama Mayu Frontier District. Distrik ini berdiri sejak tahun 1961 hingga 1964, terdiri dari Kotapraja Maungdaw, Buthidaung, dan sebagian wilayah Rathedaung. Distrik ini memisahkan ketiga Kotapraja yang merupakan permukiman etnis Rohingya dari wilayah Arakan.

Situasi ini tidak bertahan lama. Pada bulan Maret 1962 selang setelah 2 tahun terpilih sebagai Perdana Menteri, pemerintahan U Nu digulingkan melalui kudeta berdarah oleh Jendral Ne Win. Ne Win yang sebelumnya pernah menjabat sebagai PM Burma menangkap U Nu beserta para menteri kabinetnya.<sup>26</sup> Kudeta ini disebabkan oleh ketidakpercayaan dari pihak militer Burma (*Tatmadaw*) terhadap sistem federal

---

<sup>25</sup> Ullah, A. (2017, Mei 24). *The Concept of Citizenship in Burma and the Status of Rohingyas*. Diambil kembali dari The Stateless Rohingya: <http://www.thestateless.com/2017/05/the-concept-of-citizenship-in-burma-and-the-status-of-rohingyas.html>

<sup>26</sup> The Telegraph. (2002, Desember 6). *General Ne Win*. Diambil kembali dari The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1415295/General-Ne-Win.html>



yang dianut Burma. Berbagai suara yang diwakili oleh parlemen dipandang sebagai penyebab ketidakstabilan dan dapat meningkatkan perselisihan antar etnis yang akan meruntuhkan persatuan negara Burma.<sup>27</sup> Pascakudeta tahun 1962, Burma beralih dari negara demokratis menjadi negara sosialis satu partai yaitu *Burma Socialist Programme Party* (BSPP). Union Parlement yang merupakan badan legislatif dua kamar Myanmar juga dibubarkan dan digantikan dengan *Union Revolutionary Council (URC)* yaitu sistem satu kamar yang semua pejabatnya berlatar belakang militer. Dengan ini secara tidak langsung semua kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan *Tatmadaw*.

Berjalannya rezim militer terhadap pemerintahan Burma langsung memberikan dampak terhadap kehidupan etnis Rohingya. Pada Februari 1963, URC menasionalisasi seluruh bank dan perusahaan bisnis di seluruh negara. Sementara itu, di Arakan sebagian besar perusahaan besar merupakan milik kaum Muslim. Di wilayah Arakan hingga toko-toko kecil milik kaum Muslim tidak terhindar dari program ini.<sup>28</sup>

Pembentukan partai tunggal BSPP juga berdampak bagi etnis Rohingya. Pada wilayah Arakan, hanya etnis Rakhine Magh yang diikutsertakan dalam partai BSPP. Pada 1 Februari 1964, URC mengakhiri status khusus wilayah administrasi *Mayu Frontier District* dan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Puncaknya pada tahun 1972, konstitusi menggabungkan wilayah *Mayu Frontier District* ke negara bagian Arakan. Selanjutnya negara bagian Arakan berganti nama menjadi negara bagian Rakhine, dan

---

<sup>27</sup> Thwin, M. A., & Thwin, M. A. (2013). Reconstruction and Nation-Building. Dalam *A History of Myanmar since Ancient Times: Traditions and Transformations* (hal. 247). London: Reaktion Books Ltd.

<sup>28</sup> (Alam, 1999). Op.cit., (hal. 26)

memberikan 100% kekuasaannya kepada etnis Rakhine dan etnis Burma penganut Budha.<sup>29</sup>

Pada tahun 1977, *Tatmadaw* dan pihak imigrasi Burma melakukan sebuah operasi militer bernama *Operation Nagamin (Dragon King Operation)* yang bertujuan untuk menyaring warga asing. Akibat dari operasi tersebut, lebih dari 200.000 jiwa etnis Rohingya diusir dan melarikan diri ke Bangladesh. Otoritas Burma mengklaim bahwa etnis Rohingya merupakan kaum ilegal di negara Burma.<sup>30</sup> Klaim ini berlanjut dengan dikeluarkannya Hukum Kewarganegaraan Burma tahun 1982. Singkatnya, warganegara menurut Hukum Kewarganegaraan Burma tahun 1982 dapat didefinisikan sebagai;

*Warga negara seperti Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine atau Shan dan kelompok etnis lainnya sebagaimana telah menetap di salah satu wilayah yang termasuk dalam Negara sebagai rumah permanen mereka dari sebelum tahun 1823 adalah warga negara Burma. Dewan Negara dapat memutuskan apakah suatu kelompok etnis merupakan warga negara atau bukan.*<sup>31</sup>

Pemerintah Burma hanya mengakui sebanyak 135 etnis sebagai ras pribumi dan berhak mendapatkan kewarganegaraan, sementara etnis Rohingya tidak termasuk dalam daftar tersebut. Pemerintah Burma juga tidak mengakui sejarah awal munculnya etnis Rohingya yang telah mendiami

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Human Rights Watch. (2000, Mei 29). *Burmese Refugees in Bangladesh*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/report/2000/05/01/burmese-refugees-bangladesh/still-no-durable-solution>

<sup>31</sup> Ibrahim, A. (2016). *From Independence to Democracy (1948-2010)*. Dalam *The Rohingyas, Inside Myanmar's Hidden Genocide* (hal. 51). New York: Oxford University Press.

wilayah Arakan sejak ratusan tahun lalu. Pemerintah Burma sebaliknya menganggap etnis Rohingya sebagai kaum imigran dari Bangladesh yang mendiami wilayah Arakan secara ilegal, sejak tibanya Kemaharajaan Britania dan melalui peperangan di wilayah tersebut. Keputusan ini mengakibatkan etnis Rohingya kehilangan hak kewarganegaraannya dan menjadi warga tanpa negara (*stateless*).

Kehilangan kewarganegaraan menghasilkan serangkaian diskriminasi terhadap etnis Rohingya, diantaranya:

### 1. Pemandahan Paksa

Etnis Rohingya dipaksa untuk pindah dan disita harta kekayaannya lalu didistribusikan kepada komunitas Buddhis. Serangkaian kerusuhan yang melibatkan kaum fundamentalis Buddhis juga mengakibatkan ribuan jiwa kehilangan tempat tinggal.

### 2. Diskriminasi dalam Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi, etnis Rohingya tidak diberikan izin untuk mendirikan usaha, sedangkan pihak Junta juga meminta pajak yang tinggi bagi etnis Rohingya yang mayoritas bekerja sebagai petani. Dampaknya banyak lahan pertanian milik etnis Rohingya yang disita secara paksa akibat tidak dapat membayar pajak. Petani, buruh pemotong kayu, dan petani agribisnis juga diharuskan menjual barang-barangnya kepada agen yang ditunjuk dari pemerintah dengan harga yang telah ditentukan.<sup>32</sup>

### 3. Larangan Perjalanan

---

<sup>32</sup> (Hartimah, 2010). Op.cit., (hal. 90)

Etnis Rohingya di Arakan dibatasi pergerakannya di luar wilayah tersebut. Untuk pergi ke Ibukota Arakan; dari Akyab atau Yangon, mereka membutuhkan kartu perjalanan khusus. Kartu tersebut tidak mudah untuk didapatkan dan sebagian besar permintaan terhadap kartu tersebut ditolak. Menurut laporan Amnesty Internasional, etnis Rohingya yang ingin melakukan perjalanan ke kota lain atau bahkan desa lain diharuskan untuk membayar sejumlah uang dan resiko untuk digeledah di pos-pos pemeriksaan, di mana petugas Board Guard Police (BGP) memandang mereka layaknya "ATM berjalan".<sup>33</sup>

#### 4. Keterbatasan Pendidikan

Setelah mengenyam sekolah menengah di Burma, para siswa harus memiliki kartu identitas nasional. Sementara anak-anak etnis Rohingya tidak memiliki kartu tersebut.

#### 5. Keterbatasan Pekerjaan

Karena tidak memiliki hak untuk mendapatkan kartu identitas nasional, mereka memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan. Walaupun mendapat kesempatan, mereka kurang memiliki kompetensi akibat minimnya pendidikan.

#### 6. Kesulitan Menikah

Etnis Rohingya harus membayar pajak sekitar 300.000 Kyat untuk menikah. Mereka juga dilarang menikah dan

---

<sup>33</sup> Cochrane, L. (2017, November 21). *Myanmar's discrimination against Rohingya Muslims is 'apartheid': Amnesty International*. Diambil kembali dari ABC News: <http://www.abc.net.au/news/2017-11-21/myanmar-discrimination-against-rohingya-apartheid-amnesty-report/9177590>

memiliki keturunan tanpa izin pemerintah. Pasangan menikah seringkali harus menunggu waktu sekitar dua tahun untuk mendapatkan izin tersebut. Selain itu etnis Rohingya juga dibatasi dengan peraturan maksimal hanya memiliki dua anak.<sup>34</sup> Peraturan ini dilakukan demi mengurangi jumlah pertumbuhan penduduk etnis Rohingya.

## 7. Diskriminasi terhadap Kultur dan Agama

Kultur muslim dipandang agama asing dan ancaman bagi kultur Buddha. Berkumpul dan beribadah bersama bagi etnis Rohingya telah dilarang sejak kudeta 1962. Banyak tempat-tempat ibadah dan madrasah kaum muslim diubah menjadi kuil Buddha. Terjadi juga beberapa kali penyerangan terhadap masjid dan madrasah, namun kemanan negara tidak mencegah kejadian tersebut, bahkan mereka ikut berpartisipasi pada perusakan tersebut.<sup>35</sup>

## 8. Kerja Paksa

Pasukan kemanan Nay-Sat Kut-kwey ye (NaSaKa) yang terdiri dari polisi, badan imigrasi, badan intelijen, dan lembaga anti huru-hara telah memaksa banyak warga etnis Rohingya membayar sejumlah uang untuk menghindari kerja paksa seperti pekerjaan konstruksi, pekerjaan pertanian, *portering*, atau melayani sebagai penjaga.<sup>36</sup> Pasukan keamanan tersebut mengancam akan membunuh mereka jika mereka menolak mematuhi peraturan tersebut.

---

<sup>34</sup> Human Right Watch. (2013, Mei 28). *Burma: Revoke 'Two-Child Policy' For Rohingya*. Diambil kembali dari Human Right Watch: <https://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-revoke-two-child-policy-rohingya>

<sup>35</sup> Lindblom, A. (2015). *Rohingya Under Military Rule. Persecutiin of the Rohingya Muslims*, (Hal. 11).

<sup>36</sup> *Ibid*

Sejak hilangnya status warga negara bagi etnis Rohingya, telah beberapa kali Pemerintah Myanmar melakukan upaya pengusiran. Salah satunya ialah dengan cara genosida.

Upaya genosida pertama kali dilakukan pada *Operation Nagamin*, atau dikenal juga dengan nama *Operation King Dragon*. Dilancarkan pada Maret 1978, operasi ini bertujuan untuk meneliti setiap individu di dalam negara sebagai warga negara atau diduga sebagai imigran gelap.<sup>37</sup> Operasi ini merupakan peristiwa kelam bagi etnis Rohingya di Arakan Utara dimana baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda disiksa, ditangkap paksa, diperkosa, dan dibunuh. Demi menghindari persekusi yang dilakukan pemerintah Burma, Juli 1978 terjadi perpindahan massal yang dilakukan etnis Rohingya dari wilayah Arakan menuju negara Bangladesh.

Menghadapi jumlah pengungsi yang terus bertambah, pemerintah Bangladesh di satu sisi memulai negosiasi bilateral dengan pemerintah Burma, dan di sisi lain pemerintah Bangladesh juga meminta bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional. Hasil dari penggalangan dana kemanusiaan internasional tersebut disalurkan untuk membantu para pengungsi yang ditempatkan di 11 kamp pengungsian.<sup>38</sup> Pihak Bangladesh memperkirakan lebih dari 250.000 jiwa pengungsi telah ditampung di negaranya, sementara pihak Burma memperkirakan angka tersebut

---

<sup>37</sup> Ahmed, A. (2012, Januari 30). *The Rohingya: Myanmar's Outcasts*. Diambil kembali dari Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html>

<sup>38</sup> Abrar, C. (2003, Juni 22). *Repatriation of Rohingya Refugees*. Diambil kembali dari Myanmar Library: REPATRIATION OF ROHINGYA REFUGEES

berjumlah 150.000 jiwa.<sup>39</sup> Walaupun telah dibantu dengan bantuan kemanusiaan, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) melaporkan pada akhir Januari 1979 jumlah kematian pengungsi di Bangladesh telah lebih dari 10.000 jiwa.

Hingga pada Juli 1979, atas desakan kuat dari PBB, UNHCR, Pemerintah dari Arab Saudi dan India, serta *Muslim World League*, perjanjian bilateral ditandatangani oleh pemerintah Burma dan Bangladesh untuk menyetujui pemulangan pengungsi yang berasal dari wilayah Arakan. Hingga akhir tahun 1979, tercatat lebih dari 180.000 pengungsi telah kembali ke Burma.<sup>40</sup>

Upaya pengusiran selanjutnya yang dilakukan pemerintah Myanmar terjadi pada tahun 1991. Sebuah operasi militer yang kali ini dinamakan *Operation Pyi Thaya* atau dikenal juga dengan nama *Operation Clean and Beautiful Nation* dilakukan kembali oleh angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw). Sama dengan operasi sebelumnya, Operasi *Pyi Thaya* ini bertujuan untuk mengusir imigran ilegal dari negara Myanmar.

Operasi ini juga dijalankan pemerintah Myanmar dengan tujuan melawan sebuah organisasi militan bernama *Rohingya Solidarity Organisation* (RSO).<sup>41</sup> Organisasi yang

---

<sup>39</sup> Skutsch, C. (2005). Arakanese. Dalam *Encyclopedia of the World's Minorities* (hal. 128). New York: Routledge.

<sup>40</sup> UNCHR. (2000). Dalam *The State of the World's Refugees, 2000: Fifty Years of Humanitarian Action* (hal. 75). New York: Oxford University Press.

<sup>41</sup> Lintner, B. (2003, Juli). *Bangladesh: Extremist Islamist Consolidation*. Diambil kembali dari South Asia Terrorism Portal: <http://www.satp.org/satporgtp/publication/faultlines/volume14/Article1.htm>

berdiri pada tahun 1982 ini merupakan sebuah gerakan militan dari orang-orang Rohingya di wilayah Bangladesh dan wilayah perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar. RSO saat itu didukung oleh beberapa organisasi gerakan Islam lainnya seperti, *Jamaat-e-Islami* (JEI) dari Bangladesh dan Pakistan, *Hezb-e-Islami* (HEL) dari Afganistan, *Hizb-ul-Mujahideen* (HM) dari Jammu and Kashmir, dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dari Malaysia.<sup>42</sup> Pergerakan RSO yang terus berkembang sejak akhir 1980-an mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan operasi militer demi menumpas gerakan-gerakan yang dianggap melawan pemerintah ini.

Pada operasi militer ini, etnis Rohingya di Rakhine Utara kembali mendapatkan perlakuan buruk dari pasukan militer *Tatmadaw*. Selama berlakunya operasi militer ini, diskriminasi, kekerasan, dan penerapan praktik kerja paksa dilakukan oleh otoritas Myanmar. Demi menghindari penindasan tersebut, etnis Rohingya kembali berbondong-bondong pindah menuju Bangladesh. Tercatat pada bulan Maret 1992, sekitar 260.000 jiwa pengungsi Rohingya menempati kamp pengungsian di kota Cox's Bazar, Bangladesh.<sup>43</sup>

Pemerintah Bangladesh tidak menampung pengungsi Rohingya dalam waktu yang lama. Pada tanggal 29 April 1992, pemerintah Myanmar dan Bangladesh memulai program repatriasi pengungsi Rohingya dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU). MOU tersebut berisikan persetujuan Myanmar menerima kembali para pengungsi Rohingya dan membangun tempat tinggal untuk

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Resource Information Center. (1999, Desember 7). *Burma: Information on Rohingya Refugees*. Diambil kembali dari Refworld: <http://www.refworld.org/docid/3ae6a6a41c.html>



etnis Rohingya sepulangnya di Myanmar.<sup>44</sup> Sepanjang tahun 1992 hingga 1997, program repatriasi dengan bantuan UNHCR ini telah berhasil mengembalikan pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar sekitar 230.000 jiwa. Program ini akhirnya berhenti total pada Juli 2005 saat pemerintah Myanmar menolak untuk melanjutkan program tersebut dan menutup beberapa upaya pemulangan.<sup>45</sup>

Peristiwa persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar selanjutnya terjadi pada tahun 2012. Sebuah konflik komunal yang melibatkan dua pihak yaitu kaum Buddhis Rakhine dan etnis Rohingya telah mengakibatkan puluhan korban jiwa dari kedua belah pihak, dan terlantarnya ratusan ribu jiwa.

Konflik ini berawal pada Juni 2012 setelah tersebarnya berita melalui surat kabar milik pemerintah Myanmar yaitu *The New Light of Myanmar*. Surat kabar tersebut pada edisi 4 Juni 2012 memberitakan bahwa telah terjadi pemerkosaan serta pembunuhan terhadap seorang gadis Buddhis yang dilakukan oleh tiga orang pemuda bengali Muslim pada tanggal 28 Mei 2012.<sup>46</sup> Kabar berita ini disusul dengan kemarahan warga kaum Buddhis Rakhine. Sejumlah massa Buddhis Rakhine membalas peristiwa pembunuhan tersebut dengan menyerang bus berisikan kaum muslim di

---

<sup>44</sup>Abrar, C. (2003, Juni 22). *Repatriation of Rohingya Refugees*. Diambil kembali dari Burmalibrary: <http://www.burmalibrary.org/docs/Abrar-repatriation.htm>

<sup>45</sup>Lwin, E. E., & McLaughlin, T. (2014, September 6). *Government rejects repatriation reports*. Diambil kembali dari Myanmar Times: <https://www.mmmtimes.com/national-news/11561-govt-rejects-rohingya-repatriation-reports.html>

<sup>46</sup>Waluyo, T. J. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 2*, (Hal. 841)

dekat kota Taungup. Serangan balas dendam ini mengakibatkan 10 kaum muslim tewas.

Pasca kejadian tersebut, keadaan di wilayah Rakhine semakin memanas. Etnis Rohingya yang tidak terima dengan pembunuhan tersebut melancarkan aksi balasan. Pada tanggal 8 Juni 2012, setelah melaksanakan salat Jumat, ratusan warga etnis Rohingya mulai merusak rumah-rumah kaum Buddha Rakhine dengan membakar dan melemparkan batu.<sup>47</sup> Meskipun pemerintah Myanmar telah menyatakan keadaan darurat hingga dikerahkannya angkatan bersenjata di wilayah Rakhine, konflik komunal ini terus berlanjut. Berdasarkan laporan dari Menteri Luar Negeri Myanmar pada 21 Agustus 2012, akibat dari konflik di bulan Juni, 88 orang tewas, yang di antaranya 31 warga dari etnis Rakhine dan 57 warga Muslim Bengali. Selain itu, rumah-rumah dan bangunan keagamaan dari kedua komunitas juga habis terbakar. Data dari Amnesti Internasional juga menyebutkan lebih dari 140.000 jiwa menjadi pengungsi internal dan menempati tempat penampungan sementara di negara bagian Rakhine.

Beberapa konflik yang melibatkan etnis Rohingya tetap terjadi di tahun 2013 dan 2014. Sentimen anti-Muslim juga semakin kuat dengan dibentuknya sebuah gerakan bernama “969 Movement”. Gerakan yang dibentuk oleh kaum Buddhis Myanmar ini menggambarkan Muslim di Rakhine sebagai ancaman terhadap agama Buddha. Kondisi yang tidak kunjung kondusif ini menyebabkan etnis Rohingya terpaksa harus mencari tempat tinggal lain.

---

<sup>47</sup> Reuters. (2012, Juni 9). *Four killed as Rohingya Muslims riot in Myanmar: government*. Diambil kembali dari REUTERS: <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-violence/four-killed-as-rohingya-muslims-riot-in-myanmar-government-idUSBRE85714E20120608>

Pada tahun 2015, terjadi krisis pengungsi Rohingya, di mana menurut catatan UNHCR antara tahun 2012 hingga 2015 ratusan ribu etnis Rohingya telah mengarungi Selat Malaka dan Laut Andaman demi mencari suaka di negara-negara sekitar. Negara yang dituju oleh para pengungsi tersebut antara lain Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Para pengungsi tersebut datang dengan menggunakan perahu-perahu berukuran kecil yang menampung hingga ratusan orang di dalamnya.

**Gambar 2. 2 Para Pengungsi yang Tiba di Perairan Thailand**



*Sumber: CNN.com (diunduh pada 20 April 2018)*

Indonesia, Malaysia dan Thailand merespon negatif kedatangan para pengungsi tersebut. Otoritas Indonesia mengakui bahwa telah mendorong kembali perahu pengungsi yang tiba pada tanggal 11 Mei setelah menyediakan bantuan makanan dan air kepada pengungsi di kapal. Respon yang sama juga dilakukan oleh Malaysia. Melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyatakan akan mengembalikan perahu pengungsi dan mendeportasi mereka

yang mendarat. Sementara pejabat senior Thailand mengatakan bahwa pemerintahnya telah mengadopsi kebijakan untuk mendorong kapal-kapal dari pantai Thailand setelah menyediakan bahan bakar, makanan, dan air bagi para pengungsi di kapal.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Human Rights Watch. (2015 , Mei 14). *Southeast Asia: End Rohingya Boat Pushbacks*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2015/05/14/southeast-asia-end-rohingya-boat-pushbacks>